

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
LEMBAR TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	11
F. Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
G. Kerangka Pemikiran	25
1. Grand Theory: Teori Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda	25
2. Middle Theory: Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo	34
3. Applied Theory: Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah	42
4. Tinjauan Teori Kritik Hukum	51
BAB II KAJIAN PUSTAKA	69
A. Teori Tentang Kenotariatan Syariah	69
B. Teori Akad-Akad Ekonomi Syariah	82
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	96
A. Pendekatan Penelitian	96
B. Metode Penelitian	98
C. Jenis Penelitian.....	101
D. Sumber Data Penelitian Data	103
E. Teknik Pengumpulan Data	105
F. Teknik Analisis Data	106
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	115

A. Pengaturan Jabatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ditinjau dari Perspektif Hukum Islam	115
B. Urgensi Kenotariatan Syariah dalam Praktik Ekonomi Syariah	158
C. Konsep Regulasi Kenotariatan Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia	198
D. Kritik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.....	218
E. Kontribusi Kenotariatan Syariah Terhadap Hukum Ekonomi Syariah	304
F. Penawaran Gagasan Baru	331
G. Novelty dari Hasil Penelitian.....	347
BAB V PENUTUP.....	362
A. Simpulan	362
B. Saran atau Rekomendasi	364
DAFTAR PUSTAKA	366
BIOGRAFI PENELITI	417
❖ PERSONAL IDENTITY	417
❖ EDUCATIONAL BACKGROUD	417
❖ ORGANISATION EXPERIENCES	417
❖ SEMINAR AND TRAINING SPEAKER EXPERIENCES	417
❖ BOOKS WRITER.....	418



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Urgensi Notariat Syariah.....	3
Tabel 2 Persamaan dan Perbeadaan Penelitian Terdahulu dengan Disertasi Peneliti, daiambil dari berbagai sumber.	23
Tabel 3 Dampak Ketidaksesuaian Terhadap Praktik Kenotariatan	143
Tabel 4 Kendala Dan Tantangan Dalam Implementasi Regulasi Kenotariatan Syariah Di Indonesia dari berbagai Sumber.....	217
Tabel 5 Perbedaan mendasar antara UU No. 2 Tahun 2014 dan hukum Islam diambil dai berbagai sumber.	231
Tabel 6 Perbandingan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Prinsip-Prinsip Hukum Islam, dan Prinsip-Prinsip Syariah menurut DSN-MUI	235
Tabel 7 Analisis Kritik terhadap UU No. 2 Tahun 2014 dari Perspektif Hukum Islam, diambil dari berbagai sumber.	242



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perspektif Lembaga Keuangan Syariah terhadap Notaris Syariah.	4
Gambar 2 Diagram Kerangka Pemikiran.....	68

